# RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Jl. Jend. Besar A.H Nasution
No.17 Pangkalan Masyhur Medan
061-7864147

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PENATAAN RUANG KOTA MEDAN

# WALI KOTA MEDAN
# PROVINSI SUMATERA UTARA

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:

| | |
|---|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN. |
| BAB II | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH. |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV | : TUJUAN DAN SASARAN. |
| BAB V | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. |
| BAB VI | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN. |
| BAB VII | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN. |
| BAB VIII | : PENUTUP. |

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.

(3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:
a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran untuk penyempurnaannya.

Medan, September 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PENATAAN RUANG KOTA MEDAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN RUANG

Ir. ENDAR SUTAN LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640629 198503 1 005

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**BAB I. PENDAHULUAN ..... 1**

**1.1 Latar Belakang ..... 1**

**1.2 Dasar Hukum ..... 8**

**1.3 Maksud dan tujuan ..... 10**

**1.4 Sistematika Penulis ..... 11**

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... 13**

**2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 13**

**2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 20**

**2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 25**

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 26**

**BAB III. PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... 34**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ..... 34**

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 35**

**3.3 TelaahanRenstra K/L dan RenstraProvinsi ..... 36**

**3.4 TelaahanRencanaTata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 36**

**3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ..... 37**

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ..... 39**

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 39**

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 42**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... 45**

**BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 64**

**PENUTUP**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilanya perlu di dukung dengan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu. Dalam ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dokumen Rencana strategis setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Sebagai perwujudan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan menetapkan Rencana Strategis sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Tujuan , strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJMD serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah terhadap pelayanan publik dan melibatkan para pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini mengamanatkan masing-masing SKPD/OPD di lingkup Pemerintah Kota Medan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD/OPD) periode 6 (enam) tahun, ditambah

program untuk tahun ke 6 sebagai antisipasi masa transisi Kepala Daerah diakhir masa jabatan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Selain itu Renstra SKPD/OPD juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja SKPD/OPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD/OPD.

Pada prinsipnya Perencanaaan Strategi merupakan langkah aspiratif dari pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang bakal dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategi menjadi acuan. pedoman dan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, memperbaiki kinerja aparatur pemerintah, mengembangkan akuntabilitas publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam sistem perencanaan tersebut, masyarakat mempunyai peluang yang semakin besar untuk terlibat langsung dalam aktivitas pembangunan, serta semakin terbukanya peluang masyarakat untuk menumbuhkembangkan daerahnya masing-masing sesuai dengan karasteristik, potensi dan kebutuhan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD/OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD/OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Medan. Renstra SKPD/OPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD/OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahapan dan proses penyusunan Renstra Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengacu pada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017. tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD. Kegiatan-kegiatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dan informasi

a) data dan informasi gambaran pelayanan SKPD/OPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan SKPD/OPD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra SKPD/OPD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan SKPD/OPD.

b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD/OPD: mencakup (1) data pendapatan SKPD/OPD, (2) data belanja SKPD/OPD, (3) data pembiayaan SKPD/OPD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).

2. Analisis gambaran pelayanan SKPD/OPD, terdiri dari: a) analisis gambaran umum pelayanan SKPD/OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD/OPD: b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD/OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD/OPD.

3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra SKPD/OPD Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD/OPD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD/OPD kabupaten/kota, yang mencakup: a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L; b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD kabupaten/kota; dan d) program prioritas SKPD/OPD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas. Untuk penyusunan rancangan Renstra SKPD/OPD kabupaten/kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi, yang mencakup: a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L; b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas; c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi; dan d) program prioritas SKPD/OPD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup: a) tujuan dan sasaran RTRW; b) struktur dan pola ruang; dan c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.

6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan: a) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD); b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD kabupaten/kota; c) Hasil penelaahan RTRW; d) Hasil analisis dokumen KLHS; dane) Penentuan isu-isu strategis yang

akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).

7. Perumusan visi dan misi SKPD/OPD;

8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD/OPD; dan

9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD/OPD.

**Gambar I.1**
Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD

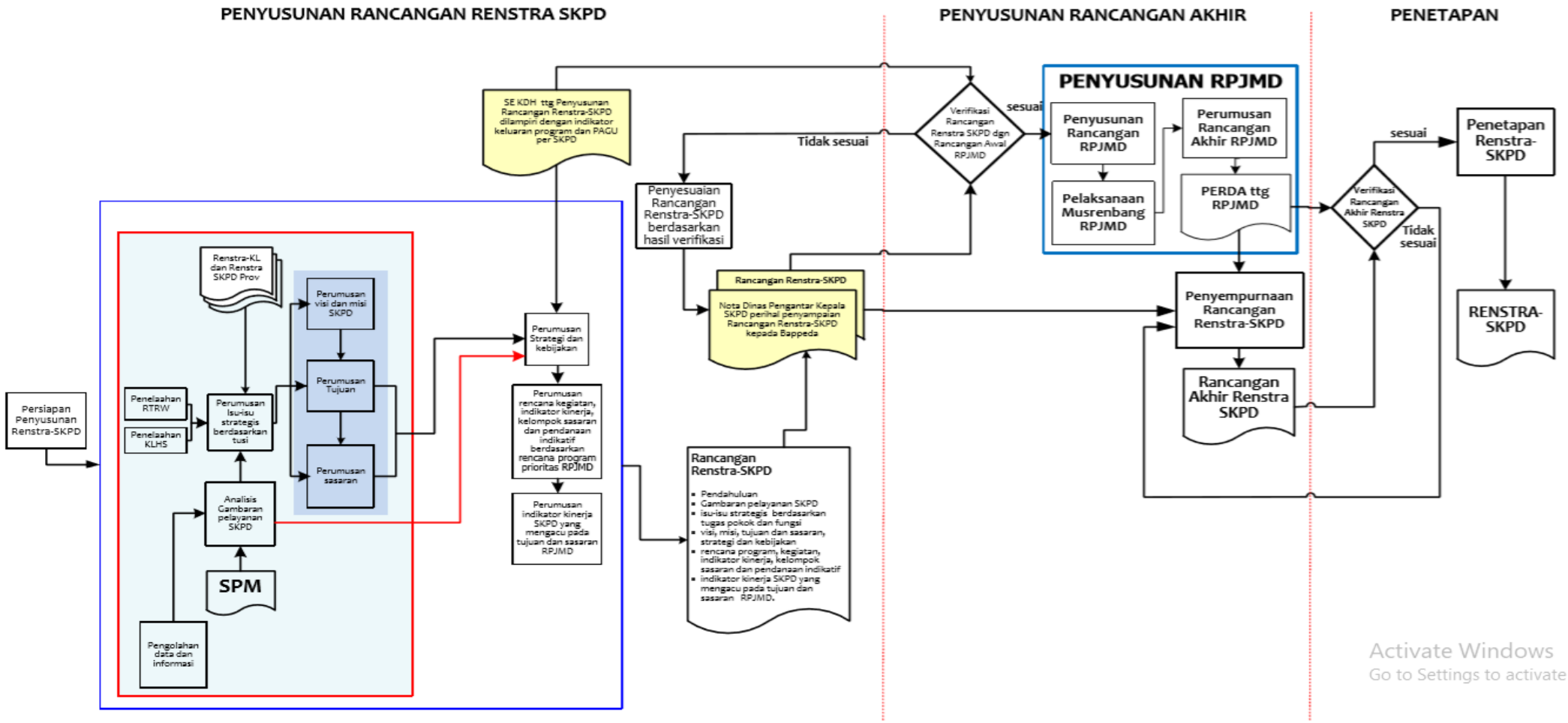


Activate Windows
Go to Settings to activate

Amanat penyusunan rencana perangkat daerah terakhir oleh Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyusunan rencana perangkat daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi,sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Hal ini diantaranya untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selain itu perlu memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sesuai Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra perangkat daerah lebih lanjut menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini :

**Bagan 1.2**

**Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah**

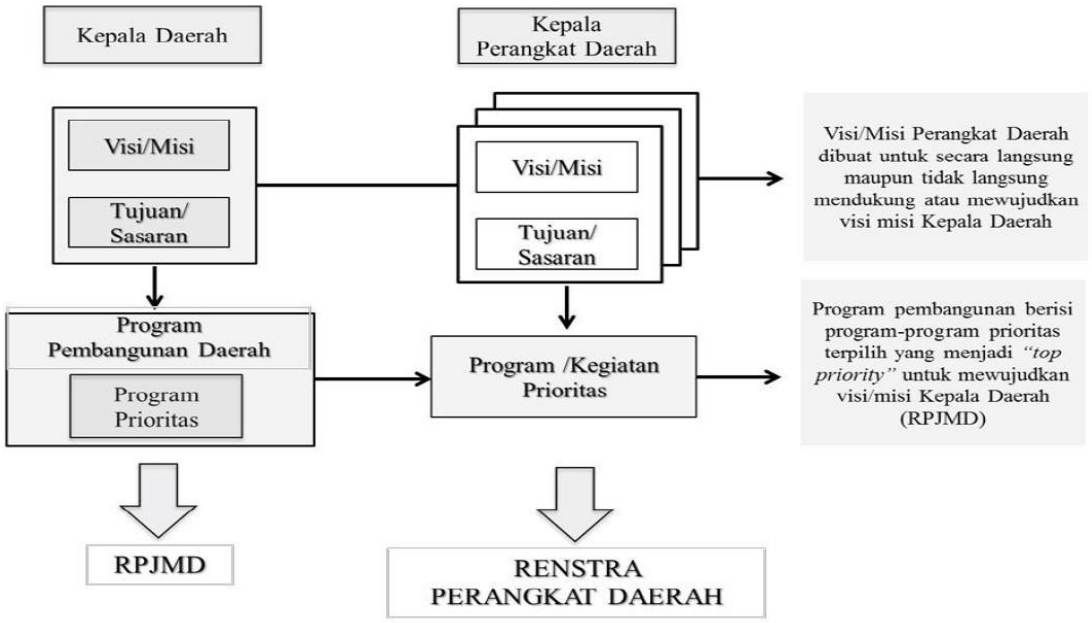


Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dalam menyokong Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Medan menyusun rencana perangkat daerah berupa Renstra Tahun 2021-2026 yang utama mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026.

## 1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini, didasarkan pada peraturan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
36. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
37. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

## I.3 Maksud dan Tujuan

### I.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk menjadi Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi pedoman pembangunan Dinas yang berkaitan dengan unsur-unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya selama 5 tahun kedepan dalam rangka mendukung terwujudnya RPJMD

### I.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dasar prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan dalam menyusun program dan kegiatan periode 2021-2026.
b. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026.

## I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan Tahun 2021-2026 ini dibagi dalam beberapa bab berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

# BAB II
# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusa, pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
d. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan memiliki kelembagaan dan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
   a. Sub Bagian Umum
   b. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah
   a. Seksi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
   b. Seksi Bangunan Pemerintah

c. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

4. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
   a. Seksi Pemetaan
   b. Seksi Perencanaan Tata Ruang
   c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang
   d. Seksi Pertanahan
5. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan
   a. Seksi Penataan dan Konservasi Bangunan
   b. Seksi Teknik Bangunan Gedung
   c. Seksi Pengawasan Teknis Bangunan dan Lingkungan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, yaitu:

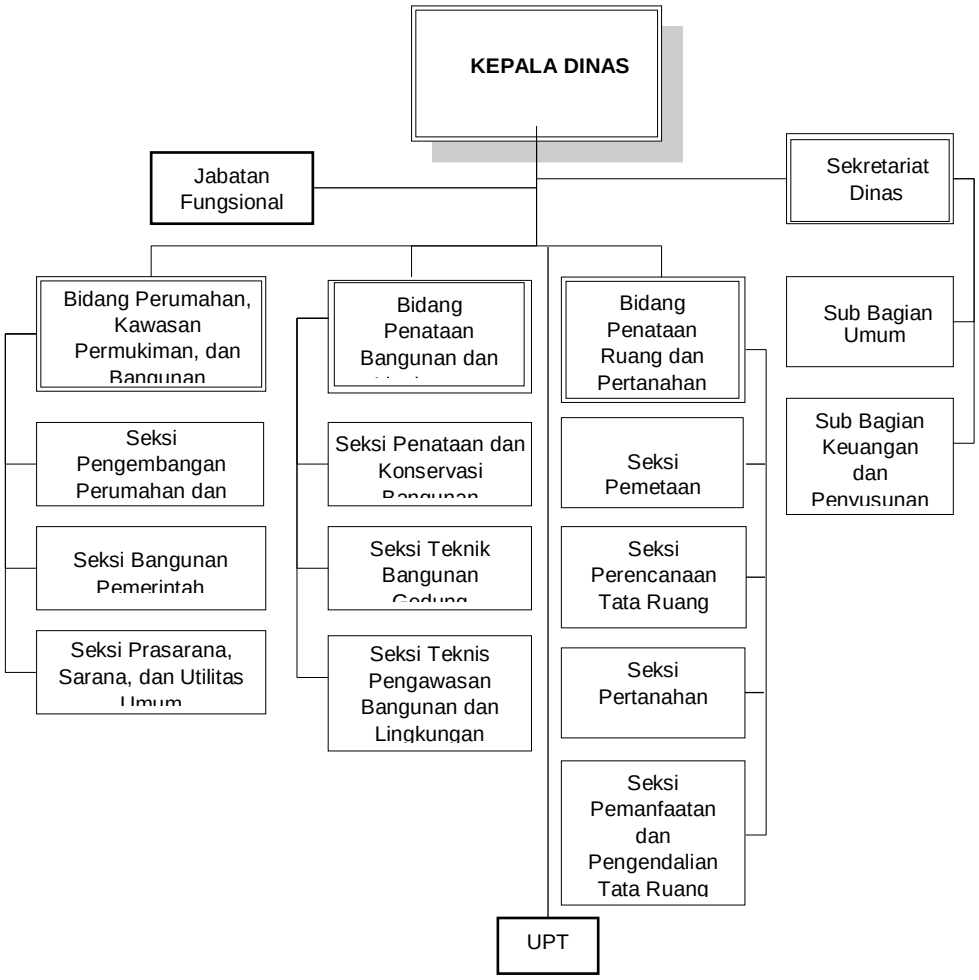

Secara umum, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan masing-masing bidang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Fasilitasi, supervisi dan pengintergrasian pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan, Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, LAKIP dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
e. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah

dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;

g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
i. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestimya, Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Bangunan Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
d. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
e. Pembinaan, Pemeliharaan dan pengelolaan rumah susun;
f. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan milik pemerintah kota;
g. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kota;
h. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh pada daerah kota;

i. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kota;
j. Penyelenggaraan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
k. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
l. Penerbitan rekomendasi untuk izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
m. Penerbitan rekomendasi untuk izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
n. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
o. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
p. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sub urusan penataan ruang, dan sub urusan pertanahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
d. Penelitian kesesuaian rencana tata ruang dalam proses rekomendasi untuk izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi (SLF);

e. Penyusunan rencana tata ruang dan perumusan kebijakan teknis penataan ruang;
f. Penyelenggaraan sosialisasi, evaluasi/peninjauan kembali, monitoring dan pelaporan pemanfaatan ruang;
g. Perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
h. Penataan dan perancangan tata letak kawasan/sub pusat kota prioritas;
i. Penataan sarana dan prasarana perkotaan serta kelengkapan jalan;
j. Perencanaan kebutuhan fasilitas sosial dan umum pada suatu kawasan atau keseluruhan kota;
k. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan untuk penataan ruang, bangunan dan kawasan permukiman;
l. Pengembangan data dan sistem informasi geografis;
m. Pemberian informasi rencana tata ruang dan advis planning;
n. Pemberian rekomendasi izin lokasi dalam wilayah kota;
o. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kota;
p. Inventarisasi dan pendataan masalah pertanahan;
q. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengukuran, pemetaan, pengembangan data dan Sistem Informasi;
r. Penyelenggaraan pemeliharaan/perawatan dan pembaharuan peta dasar analog dan digital dan dokumentasi lapangan serta penerapan sistem informasi geografis (SIG) dalam pemetaan
s. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
t. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
u. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup sub urusan Perumahan, sub urusan Bangunan Gedung, sub

urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan Dan sub urusan Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan (SKBG);
e. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
f. konservasi bangunan cagar budaya melalui pembinaan dan penataan;
g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
h. Perencanaan dan pemeriksaan teknik konstruksi dan mekanikal elektrikal bangunan gedung;
i. Pengawasan pelaksanaan izin mendirikan bangunan;
j. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota, termasuk pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang terkait dengan keandalan bangunan;
k. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
l. Pendataan bangunan gedung;
m. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
n. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;

o. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia perlu merupakan hal yang penting karena menjadi modal dalam pelaksanaan kerja. Dalam kurun waktu hingga Maret 2017, sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Penataan Ruang Kota Medan, yang merupakan penggabungan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan dan Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan, berjumlah 347 orang yang terdiri dari 153 orang PNS dan 194 orang tenaga PHL.

Ada pun komposisi pegawai menurut jenis kelamin dan golongan dalam tiap bidang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan

| No | Bidang | Jumlah Pegawai | | Golongan | | | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IV | | III | | II | | I | | |
| | | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | |
| 1 | Sekretariat | 20 | 24 | 1 | 1 | 13 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 44 |
| 2 | Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah | 31 | 8 | 1 | 0 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 3 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 23 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Penataan Ruang dan Pertanahan | 27 | 13 | 1 | 0 | 22 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| Jumlah | | 101 | 53 | 3 | 1 | 84 | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 153 |
| | | 153 | | 4 | | 122 | | 27 | | 0 | | |

Untuk komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan

| No | Bidang | Tingkat Pendidikan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | S-2 | S-1 | D-3 | SMA |
| 1 | Sekretariat | 5 | 20 | 3 | 16 |
| 2 | Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah | 8 | 20 | 0 | 10 |
| 3 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | 6 | 17 | 2 | 6 |
| 4 | Penataan Ruang dan Pertanahan | 5 | 19 | 1 | 15 |
| Jumlah | | 24 | 76 | 6 | 47 |
| | | 153 | | | |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan aset pemerintah untuk mendukung kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana yang ada saat ini adalah :

Tabel 2.3.

Daftar Sarana Prasarana Pendukung Kinerja Dinas PErumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

| No | Jenis Barang | Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | Unit | 2 |
| 2 | Meja Kayu/Rotan | Unit | 90 |
| 3 | Meja Komputer | Unit | 36 |
| 4 | Meja Rapat | Unit | 6 |
| 5 | Meja Tulis | Unit | 21 |
| 6 | Meja Panjang | Unit | 3 |
| 7 | Meja Kerja | Unit | 60 |
| 8 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | Unit | 5 |
| 9 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain | Unit | 2 |
| 10 | Meja Maket/Peta | Unit | 1 |
| 11 | Meja Biro | Unit | 131 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Meja Operator | Unit | 1 |
| 13 | Mesin Calculator | Unit | 30 |
| 14 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13) | Unit | 2 |
| 15 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | Unit | 9 |
| 16 | Mesin Ketik Elektronik | Unit | 2 |
| 17 | Mesin Ketik Lain-lain | Unit | 4 |
| 18 | Mesin Hitung Listrik | Unit | 2 |
| 19 | Mesin Absensi | Unit | 18 |
| 20 | Mesin Gergaji | Unit | 1 |
| 21 | Mesin Listrik Standar | Unit | 1 |
| 22 | Mesin Penghitung Uang | Unit | 1 |
| 23 | Mesin Cetak Listrik Elektronik | Unit | 1 |
| 24 | Mesin Cetak Offset Roll | Unit | 1 |
| 25 | Monitor | Unit | 30 |
| 26 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | Unit | 7 |
| 27 | Meteran Kain | Unit | 2 |
| 28 | Microphone/Wireless Mic | Unit | 1 |
| 29 | Microphone | Unit | 1 |
| 30 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | Unit | 1080 |
| 31 | Air Conditioning Unit | Unit | 44 |
| 32 | Alat Penghancur Kertas | Unit | 10 |
| 33 | Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) | Unit | 32 |
| 34 | ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) | Unit | 6 |
| 35 | Alat Dapur Lainnya | Unit | 2 |
| 36 | Amplifiler | Unit | 1 |
| 37 | Audio Phone In | Unit | 1 |
| 38 | Adaptor | Unit | 1 |
| 39 | Pick Up | Unit | 6 |
| 40 | Perkakas Bengkel Kerja Lain-lain | Unit | 40 |
| 41 | Printer | Unit | 164 |
| 42 | Pick Up | Unit | 5 |
| 43 | Palu | Unit | 1 |
| 44 | Peralatan Jaringan Lain-lain | Unit | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 | Proyektor + Attachment | Unit | 8 |
| 46 | Pesawat Telephone | Unit | 6 |
| 47 | Papan Nama Instansi | Unit | 1 |
| 48 | Personal Komputer Lain-lain | Unit | 5 |
| 49 | P.C Unit | Unit | 68 |
| 50 | Ploter | Unit | 2 |
| 51 | Personal Komputer | Unit | 7 |
| 52 | Peta | Unit | 1 |
| 53 | Peralatan Mini Komputer Lain-lain | Unit | 25 |
| 54 | Sepeda Motor | Unit | 45 |
| 55 | Scanner | Unit | 2 |
| 56 | Sofa | Unit | 3 |
| 57 | Server | Unit | 1 |
| 58 | Sound System | Unit | 2 |
| 59 | Stabilizer | Unit | 12 |
| 60 | Lemari Besi | Unit | 67 |
| 61 | Lemari Kaca | Unit | 2 |
| 62 | Lemari Kayu | Unit | 34 |
| 63 | Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II | Unit | 1 |
| 64 | Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III | Unit | 1 |
| 65 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | Unit | 9 |
| 66 | Loudspeaker | Unit | 3 |
| 67 | Lambang Garuda Pancasila | Unit | 2 |
| 68 | Lap Top | Unit | 18 |
| 69 | Kursi Putar | Unit | 330 |
| 70 | Kursi Biasa | Unit | 10 |
| 71 | Kursi Lipat | Unit | 41 |
| 72 | Kursi Besi/Metal | Unit | 239 |
| 73 | Kursi Rapat | Unit | 56 |
| 74 | Kursi Tangan | Unit | 5 |
| 75 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Unit | 3 |
| 76 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | Unit | 4 |
| 77 | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain | Unit | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 78 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain | Unit | 1 |
| 79 | Kursi Kayu/Rotan/Bambu | Unit | 8 |
| 80 | Kipas Angin | Unit | 13 |
| 81 | Kursi Rapat | Unit | 10 |
| 82 | Kursi Tamu | Unit | 2 |
| 83 | Rak Besi/Metal | Unit | 69 |
| 84 | Rak Kayu | Unit | 16 |
| 85 | Filling Besi/Metal | Unit | 154 |
| 86 | Facsimile | Unit | 1 |
| 87 | Jangka Besi | Unit | 10 |
| 88 | Jeep | Unit | 1 |
| 89 | Jam Mekanis | Unit | 1 |
| 90 | Global Positioning System | Unit | 3 |
| 91 | Gunting Plat Tangan | Unit | 1 |
| 92 | Gambar Presiden/Wakil Presiden | Unit | 2 |
| 93 | White Board | Unit | 5 |
| 94 | Overhead Projektor | Unit | 1 |
| 95 | Camera + Attachment | Unit | 7 |
| 96 | Camera Video | Unit | 2 |
| 97 | Camera Film | Unit | 2 |
| 98 | Camera Electronic | Unit | 16 |
| 99 | CPU | Unit | 26 |
| 100 | Compact Disc. Player | Unit | 1 |
| 101 | Unintemuptible Power Supply (UPS) | Unit | 73 |
| 102 | Televisi | Unit | 5 |
| 103 | Band Kas | Unit | 2 |
| 104 | Note Book | Unit | 77 |
| 105 | Hard Disk | Unit | 36 |
| 106 | Handy Cam | Unit | 1 |
| 107 | Exhause Fan | Unit | 16 |
| 108 | Dispenser | Unit | 1 |
| 109 | Intercom Unit | Unit | 12 |
| 110 | Video Monitor | Unit | 1 |

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan SKPD dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang. Secara garis besar, SKPD melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk urusan penataan kota dan ruang sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan untuk urusan perumahan dan permukiman yang telah ditentukan.

Pelayanan umum yang dilakukan dalam termasuk didalamnya pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintahan, sarana dan prasarana gedung pelayanan masyarakat, prasarana dasar permukiman, jaringan air bersih, sanitasi, penataan kawasan kumuh, penataan bangunan dan ruang, dan pengendalian serta pemanfaatan penataan ruang.

Pada umumnya, SKPD melakukan pelayanan dan pendukung kegiatan masyarakat dan bertujuan untuk menyediakan dan menjaga sarana dan prasarana kota dan lingkungan. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut SKPD didukung oleh bidang atau unit kerja yaitu (1) Sekretariat yang bertugas melayani administrasi perkantoran; (2) Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah dengan fokus layanan pada perumahan, bangunan milik pemerintah, dan kualitas kawasan permukiman; (3) Penataan Ruang dan Pertanahan yang berfokus pada penyusunan rencana tata ruang, kebijakan teknis penataan ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, sarana dan prasarana perkotaan, kebutuhan fasilitas umum dan sosial, pemetaan, pengembangan data dan sistem informasi geografis, dan pertanahan; (4) Penataan Bangunan dan Lingkungan yang berfokus pada layanan untuk perencanaan sarana, prasarana, dan utilitas umum, konstruksi bangunan, dan penataan bangunan dan lingkungan. Untuk capaian sampai pada akhir periode Renstra sebelumnya khusus untuk Indikator SPM adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Sesuai SPM | Indikator Sasaran | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | Tersedianya Rumah Layak Huni | Persentase Rasio rumah layak huni | 85% |
| 2 | Berkurangnya lingkungan kumuh | Luas Area Lingkungan Kumuh | 200,292 Ha |
| 3 | Tersedianya jaringan air bersih | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum | 87% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | layak | |
| 4 | Tersedianya sanitasi | Persentase rumah tinggal bersanitasi aman | 4,85% |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah harus selaras atau mendukung dengan pelayanan organisasi perangkat daerah di atasnya. Untuk tingkat kementerian, Organisasi Perangkat Daerah memiliki keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedangkan dalam tingkat Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan Dinas Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) secara umum yang tertuang dalam Renstra Kemen-PUPR adalah menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua".
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.

Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020–2024 yang berkaitan dengan tupoksi dan pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Penataan Ruang Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air, terdiri dari kegiatan:
   (a) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku
   (b) Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman
   Pantai
   (c) Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
   (d) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi
   (e) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari kegiatan:
   (a) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung
   (b) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan
   (c) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak
   (d) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak
   (e) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman
   (f) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni
   (g) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.

Sedangkan dalam Renstra Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara 2013-2018, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Membangun prasarana dan sarana permukiman pada kawasan lintas kabupaten / kota, kawasan kumuh, agropolitan/minapolitan, pulau-pulau terluar dan terpencil, desa nelayan, kawasan bencana, daerah tertinggal, serta kawasan khusus.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengembangkan fungsi-fungsi kawasan Permukiman yang dapat dijadikan sebagai pusat orientasi dan magnet kawasan dengan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan serta diimbangi dengan penataan sistem sirkulasi dan ruang terbuka hijau yang baik dan memadai serta berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungannya yang tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan yang terjangkau bagi semua golongan
6. Meningkatkan kualitas organisasi, tata laksana dan Sumber Daya Manusia yang professional, mandiri, dengan menerapkan prinsip good governance.

Menurut RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, beberapa permasalahan pembangunan kota Medan yang berkaitan dengan infrastruktur dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Banjir

   Banjir yang terjadi di Kota Medan umumnya terjadi pada titik/lokasi yang hampir sama setiap tahunnya. Rutinnya banjir yang muncul setiap tahun pada lokasi yang tidak berubah menjadi tanda bahwa rumitnya penanganan dan penyelesaian permasalahan banjir yang dihadapi oleh Pemerintah Kota. Sulitnya totalitas penanganan banjir oleh Pemerintah Kota disebabkan titik lokasi yang akan ditangani umumnya merupakan wilayah ekonomi yang memiliki aktivitas yang tinggi, sehingga bila dilakukan perbaikan akan memaksa Pemerintah mensterilkan lokasi untuk beberapa waktu guna perbaikan/pelebaran drainase. Tolakan dari masyarakat akibat terganggunya aktivitas perekonomian dan usaha menjadi salah satu faktor yang menyulitkan penanganan banjir saat ini. Bila hal ini tidak ditangani segera

maka banjir yang rutin pada lokasi/titik yang terjadi akan meluap ke lokasi lain yang berada disekitarnya dan tanpa disadari akan menyebabkan terganggunya ekonomi dan usaha yang lebih luas dan besar di masa yang akan datang. Beberapa drainase di kota yang tidak berfungsi dan tidak terintegrasi dengan baik satu dengan yang lain juga merupakan salah satu penyebab banjir Kota Medan. Selain sistem drainase, faktor manusia dan aktivitas masyarakat kota juga mendorong peningkatan dan pelebaran lokasi banjir saat ini. Aktivitas manusia seperti membuang sampah ke sungai/drainase, dan membangun pada Daerah Aliran Sungai (DAS) membuat terjadinya sedimentasi, penyempitan dan kinerja sungai dan drainase menjadi tidak maksimal bahkan tidak dapat berfungsi sama sekali. Minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menjadi pendukung peningkatan banjir di Kota Medan.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

   Secara umum rumusan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dalam Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Medan adalah :

   a. Sumber air baku untuk pelayanan air minum Kota Medan semakin terbatas, selain karena kapasitas pengambilan sudah semakin terbatas, juga karena debit andalan sungai juga semakin berkurang
   b. Belum meratanya air bersih ke seluruh bagian wilayah dengan pelayanan utama melalui jaringan pipa distribusi air minum baik dalam hal kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya.
   c. Mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih antara kapasitas air bersih dengan jumlah konsumen.
   d. Kelembagaan pengelola air minum di Kota Medan bukan berada pada kewenangan Pemerintah Kota Medan, melainkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sedikitnya menyulitkan bagi Pemerintah Kota Medan untuk melakukan percepatan peningkatan pelayanan air minum melalui pemberian dukungan finansial langsung kepada PDAM Tirtanadi.

3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

   Permasalahan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah sebagai berikut:

   a. Aspek Teknis : Pengembangan Sarana dan Prasarana

- Masih terdapat 22.792 KK yang melakukan melakukan buang air besar sembarangan (BABS).
- Tidak standarnya bangunan tangki septic masyarakat dimana hampir semua tangki septic tidak kedap dan effluennya disalurkan langsung ke selokan/ saluran drainase tersier/ tanah maupun badan air lainnya sementara itu bidang resapan juga kurang maksimal.
- Terbatasmya APBD Kota Medan dimana persentase pembiayaan sanitasi layak dan aman tahun 2014 – 2019 rata-rata hanya 40.22 %.
- Masih rendahnya sanitasi aman Kota Medan yakni 4.85 % di tahun 2020.

b. Aspek non-Teknis : Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi.

- Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan dalam perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan IPAL Komunal dan Kawasan serta penyusunan dan legalisasi Perda dokumen Masterplan Air Limbah sebagai acuan dalam pembangunan sub sektor air limbah domestik.
- Belum optimalnya Pemerintah Kota untuk "mengajak" pihak swasta dan masyarakat untuk pembangunan dan pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
- Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Walikota mengenai kewajiban setiap rumah tangga untuk menyambung pada sistem pengelolaan air limbah perkotaan.
- Masih rendahnya kesadaran swasta khususnya developer perumahan untuk membangun IPAL di lingkungan perumahan.

4. Penataan Ruang

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 penataan ruang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Hasil evaluasi RTRW Kota Medan masih menunjukkan masih adanya penyimpangan terhadap rencana struktur ruang dan pola ruang Kota Medan diakibatkan oleh dinamika pembangunan.

Kondisi Struktur ruang yang menjadi perhatian :

- Tingkat kemacetan di Kota Medan mulai meningkat sehingga perlu dipikirkan untuk peningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Medan agar dapat

mengurangi beban transportasi di Kota Medan. Selain itu, perlu meningkatkan aktifitas jalur kereta api (jalur barat-timur dan jalur utara-selatan) untuk melayani angkutan barang dan *commuter* pekerja yang ada di Kota Medan.

- Perlu memikirkan dan melaksanakan konsep TOD (*Transit Oriented Development*) dan pembangunan jalan baru di Utara Kota Medan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat

Kondisi pola ruang yang menjadi perhatian diantaranya :

- Adanya ketimpangan pembangunan kawasan budidaya antara bagian utara Kota Medan dan bagian selatan Kota Medan sehingga perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan pembangunan yang agresif pada bagian utara Kota Medan terutama untuk fasilitas ekonomi serta sarana dan prasarana perkotaan.
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan kawasan budidaya di Kota Medan sudah semakin terbatas, perlu diambil kebijakan untuk mulai melaksanakan pembangunan kawasan terbangun dengan pendekatan pembangunan vertikal untuk perumahan, perkantoran serta perdagangan dan jasa agar pemanfaatan lahan di Kota Medan dapat dioptimalkan.
- Permasalahan kawasan lindung di Kota Medan adalah pencapaian Ruang Tebuka Hijau (RTH) belum mencapai 30 % (20% public dan 10% private), perlu di pertimbangkan melaksanakan pembelian lahan tiap tahun untuk penyediaan RTH agar RTH yang dipersyaratkan dapat tercapai.

5. Kawasan Kumuh

   Terjadinya peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh sebelumnya di tahun 2018 seluas 200,219 Ha tuntas di tahun 2019, dan pada tahun 2020 dilakukan updating sehingga diperoleh peningkatan area kumuh seluas 819,80 Ha.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

Dalam kaitannya dengan urusan permukiman, tantangan yang dihadapi adalah untuk mewujudkan program MDGs 100-0-100 yaitu 100% (ketersediaan air minum 0% kawasan kumuh dan 100% fasilitas sanitasi dan drainase)

Dalam kaitannya dengan urusan penataan ruang, tantangan yang dihadapi antara lain adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan ketentuan yaitu 30 % (20% public dan 10% private) dari luas area kota.

Walaupun terdapat tantangan namun terdapat peluang untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain dukungan yang besar dari Wali Kota Medan dan tersedianya pendanaan yang cukup.

Berikut kami tampilkan analisis SWOT yang terdiri atas lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. **Lingkungan Internal**

**KEKUATAN (S):**

- Kebijakan / Peraturan yang mendukung;
- Komitmen dari Kepala Dinas yang kuat;
- Tersedianya SDM/pejabat yang mengisi jabatan struktural di Struktur Organisasi Dinas untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
- Jumlah personil yang memadai dan solid;
- Gedung Kantor yang cukup baik.

**KELEMAHAN (W):**

- Belum memadainya sarana dan prasarana untuk operasional pelayanan;
- Kurangnya kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Keterbatasan dana anggaran;
- Belum optimalnya koordinasi dengan OPD lainnya;
- Belum baiknya Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan kerja.

2. **Lingkungan Eksternal**

**PELUANG (O):**

- Banyaknya pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan;
- Dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam pelaksanaan program/kegiatan;

**ANCAMAN (T):**

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga asset yang dimiliki pemerintah;
- Pertumbuhan penduduk yang pesat;
- Perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang tidak seimbang;
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung program pemerintah.

# BAB III
# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Identifikasi tugas dan fungsi kerja berangkat dari pemahaman tentang penataan kota, pemanfaatan lahan, dan pengendalian pembangunan kota yang mengacu pada tiga pilar Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu: (i) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan; (ii) indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi; dan (iii) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam keterkaitannya dengan konsep tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan berfokus pada ketiga pilar tersebut dengan kapasitas pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan seperti pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dasar permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta perencanaan, pengendalian, dan pemanfaatan ruang.

### 3.1.1 Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah

Bidang ini mengidentifikasi permasalahan mengenai penyelenggaraan dan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman dengan memahami konsep lingkungan yang berkesesuaian yang aman dan sehat dan berfokus pada perencanaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dan bangunan gedung. Dukungan terhadap layanan tersebut dapat dilihat dengan program dan kegiatan yang berkesinambungan selama beberapa tahun ini dengan salah satu tujuan untuk mengurangi permukiman kumuh di Kota Medan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan sasaran pembangunan infrastruktur dasar dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dimaksud.

### 3.1.2 Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Identifikasi permasalahan pada bidang ini berawal dari pemahaman terhadap perencanaan dan pemanfaatan ruang dan kota dalam manajemen pembangunan. Manajemen pembangunan dibutuhkan agar pembangunan yang dilaksanakan terarah, terpola, dan

terstruktur dalam rencana, implementasi dan pengendalian yang berkaitan dengan unsur-unsur publik agar pembangunan tercapai secara optimal sesuai dengan sumber daya.

Rencana Tata Ruang merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan tata ruang yang membutuhkan Perda untuk mengawasi implementasi kebijakan spasial dan penerapan realisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Perda yang telah diterbitkan, selain sebagai pengawasan, juga menjadi acuan untuk melaksanakan pengendalian ruang yang dimaksud meliputi Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang, Peraturan Zonasi.

### 3.1.3 Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan

Identifikasi permasalahan dalam bidang ini adalah pemahaman tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, dan berkualitas. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dilakukan agar pembangunan memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam pembangunan infrastruktur ini dibutuhkan perencanaan fisik yang dilakukan secara terencana dan terukur untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengawasan.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan daerah dan merupakan integrasi dari harapan, keinginan, dan cita-cita bersama. Adapun pembangunan ini diselenggarakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara bertahap dan berkesinambungan secara stabil dan bertumbuh. Cita-cita tersebut diharapkan dapat dicapai melalui visi daerah Kota Medan, yang dituang dalam RPJMD Kota Medan, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”.

Selanjutnya, misi daerah yang ingin diusung dalam mewujudkan visi ini adalah:

1. Medan Berkah

   Mewujudkan Kota Medan yang berkah dengan memegang tegug nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Medan Maju

   Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua

3. Medan Bersih

   Menciptakan keadilan sosial melalu Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta tercapainya pelayanan publik yang prima, adil, dan merata.

4. Medan Membangun

   Membangunan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM

5. Medan Kondusif

   Mewujudkan kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supermasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Medan Inovatif

   Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital, dan sosial budaya.

7. Medan Beridentitas

   Mewujudkan Kota Medan yang beradab, santun harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air

## 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Adapun faktor penghambat dari perangkat daerah untuk mendukung sasaran jangka menengah kementerian dan Provinsi adalah terbatasnya dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga. Sedangkan faktor pendorong yaitu adanya petunjuk pelaksanaan pekerjaan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan lembaga.

## 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kurangnya luas ruang terbuka hijau di Kota Medan untuk memenuhi kebutuhan RTH sebesar 30%, yang terdiri dari 20 % RTH Publik dan 10% RTH Private. Sesuai Perda No. 2 Tahun 2015 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035 RTH publik seluas ± 6.501,33 ha (22,26%) dari luas Kota Medan, meliputi:

a. sub zona RTH taman kelurahan;
b. sub zona RTH taman kota;
c. sub zona RTH taman pemakaman umum;
d. sub Zona RTH kawasan wisata;
e. sub Zona RTH hutan kota;

f. sub Zona RTH lapangan olahraga; dan

g. sub Zona RTH jalur hijau jalan.

sedangkan RTH privat seluas ± 2.920,49 ha atau (± 10%) dari luas wilayah Kota Medan, meliputi:

a. RTH pekarangan; dan

b. RTH atap bangunan.

Saat ini luas RTH Pubik Kota Medan masih ± 6%, sehingga masih dibutuhkan sekitar 15% (4.380,74 ha) yang direncanakan akan tercapai sampai tahun 2035.

Rencana Fasilitas Umum dan Sosial yang menjadi lingkup kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan, meliputi :

1) Pengadaan lahan dan Perencanaan IPAL Komunal
2) Pengadaan lahan dan Perencanaan Pengelolaan Sampah

   Rencana sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan sistem 3R, terdiri atas:

   a) TPS ditetapkan di masing-masing Kecamatan
   b) Bank sampah dikembangkan di setiap lingkungan atau kawasan seluas 500-1.000 meter².
   c) TPA mandiri dikembangkan di setiap kawasan perumahan kepadatan, sedang, dan rendah dengan teknologi yang telah ditentukan rencana sistem pengelolaan sampah 3R;
   d) TPA ditetapkan di TPA Terjun Kel. Terjun Kec. Medan Marelan seluas ± 13,44 ha dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*.

Adapun Rencana pengembangan TPA Terjun selanjutnya adalah Perluasalan lahan TPA Terjun, Revitalisasi TPA Terjun, dan Pengembangan TPA Regional yang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

## 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis yang perlu mendapatkan penanganan dalam skala prioritas dalam program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan dapat diidentifikasi dalam tabel di bawah ini:

| No | Isu Strategis |
|---|---|
| 1 | Program SDG'S 100-0-100 (100% ketersediaan air minum 0% kawasan kumuh dan 100% fasilitas sanitasi dan drainase) |
| 2 | Pemenuhan ketersediaan rumah layak huni bagi MBR |
| 3 | Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi |
| 4 | Penanganan Banjir |
| 5 | Penataan dan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, masih perlu dimaksimalkan untuk mendukung aktifitas sosial dan budaya masyarakat |
| 6 | Penataan dan pembangunan fasilitas perdagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat |
| 7 | Penataan ruang kota yang harus lebih dioptimalkan |
| 8 | Keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) |
| 9 | Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang masih belum mencapai sesuai dengan persyaratan |

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan adalah perwujudan visi dan misi daerah Kota Medan yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Tujuan ini sebagai panduan untuk perencanaan dan pencapaian hasil kerja yang akan diprogramkan dalam Rencana Kerja.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut diterjemahkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan | Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya | Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni | 65 % | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | | Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis | Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memada | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| 2 | Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan | Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan | Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tersedianya lahan bagi pembangunan kota | Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Meningkatkan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni | Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi aman | Persentase rumah tinggal bersanitasi aman | 5,31% | 5,8% | 6,71% | 8,11% | 10,03% | 12,22% |
| | | Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap air minum layak | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak | 90,25% | 93,5% | 96,75% | 98% | 100% | 100% |
| | | Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | 96,9% | 97,9% | 98,4% | 98,9% | 99,4% | 100% |
| | Meningkatkan rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh | Meningkatnya rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh | Persentase Rasio rumah layak huni | 85% | 88,75% | 92,5% | 96,25% | 100% | 100% |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Ranwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan 2021-2026 perlu ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai langkah dalam mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya visi dan misi yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun. Strategi adalah rumusan umum untuk mencapai sasaran secara spesifik yang dijabarkan ke masing-masing kebijakan berdasarkan analisis SWOT, Strenght (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Thread (Tantangan). Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan internal. Pada bagian ini, akan dijelaskan tentang relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Medan yang terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD periode 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebikakan Perangkat Daerah yang telah ditentukan oleh Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Perumusan strategi dan kebijakan menjadi titik awal pelaksanaan pembangunan melalui program yang akan diselenggarakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan | Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya | - Mewujudkan perencanaan fasilitas public yang ramah lingkungan<br>- Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur perkantoran dan fasilitas umum<br>- Melaksanakan sertifikasi kehandalan bangunan | - Perencanaan bangunan yang ramah anak dan difabel<br>- Pembangunan dan rehabilitasi gedung perkantoran dan fasilitas umum |
| | | Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis | Mewujudkan Destinasi Wisata Terintegrasi | - Penyiapan RTBL dan DED Kawasan Wisata Terintegrasi<br>- Perlindungan terhadap kota pusaka dalam rangka konservasi warisan budaya |
| 2 | Mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan | Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan ligkungan guna mewujudkan ruang kota yang nyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan | Optimalisasi ketersediaan kebijakan dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan | - Pembuatan kebijakan dan dokumen perencanaan\<br>- Mewujudkan sistem informasi rencana tata ruang yang handal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Tersedianya lahan bagi pembangunan kota | Optimalisasi pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan kota dengan anggaran yang tersedia | Berkoordinasi dengan stakeholder terkait |
| 3 | Meningkatkan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni | Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi aman | Menyediakan distribusi jaringan air bersih dan sanitasi yang aman dan layak | Penyediaan jaringan air bersih dan sanitasi |
| | | Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap air minum layak | | |
| | | Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni | Melakukan perbaikan terhadap kualitas rumah dan kawasan kumuh | - Perbaikan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan kawasan kumuh<br>- Peningkatan kualitasa sarana dan prasarana pada kawasan kumuh |
| | Meningkatkan rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh | Meningkatnya rumah layak huni pada kawasan permukiman kumuh | | |

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan merupakan terjemahan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang merupakan hasil pengidentifikasian dari isu-isu strategis. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

# Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| Memfasilitasi penyediaan infrastruktur pengelolaan persampahan | | | | Persentase infrastruktur pengelolaanpersampahan yang terbangun | % | 0 | 0 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 100 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Terfasilitasiny apenyediaan infrastruktur pengelolaan persampahan | | | Jumlah infrastruktur pengelolaan persampahan terfasilitasi yang dibangun | unit | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.04 | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | | | | | 16.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 68.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Cakupan TPA/TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan | % | 0 | 0 | 16.000.000.000 | 20 | 4.000.000.000 | 20 | 12.000.000.000 | 20 | 12.000.000.000 | 20 | 12.000.000.000 | 20 | 12.000.000.000 | 100 | 68.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di DaerahKabupaten/Kota | | | | | 16.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 12.000.000.000 | | 68.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah TPA/ TPST terfasilitasi yang dibangun/ direhabilitasi/ ditingkatkan | unit | 1 | 1 | 16.000.000.000 | 1 | 4.000.000.000 | 1 | 12.000.000.000 | 1 | 12.000.000.000 | 1 | 12.000.000.000 | 1 | 12.000.000.000 | 1 | 68.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.04.2.01.03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | 16.000.000.000 | | 4.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 60.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah TPA/TPST yang dibangun | unit | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.04.2.01.05 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | | | | | 0 | | 0 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 2.000.000.000 | | 8.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah TPA/TPST yang direhabilitasi | unit | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 6 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan | |

***Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang***

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | |
| Mewujudkan ruang kota yangaman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan | | | | Perwujudan RTRW | % | 0 | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | 0 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Terwujudnya kota medan sebagai kota wisata multikultural melalui penataan kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis | | | Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yangmemadai | % | 0 | 0 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | | | | | 6.425.000.000 | | 8.000.000.000 | | 7.080.000.000 | | 7.360.000.000 | | 7.640.000.000 | | 7.920.000.000 | | 44.425.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | | | | Persentase kawasan strategis budaya dan lingkungan permukiman strategis yang ditata | % | 0 | 10 | 6.425.000.000 | 20 | 8.000.000.000 | 40 | 7.080.000.000 | 60 | 7.360.000.000 | 80 | 7.640.000.000 | 100 | 7.920.000.000 | 100 | 44.425.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya diDaerah Kabupaten/Kota | | | | | 6.425.000.000 | | 8.000.000.000 | | 7.080.000.000 | | 7.360.000.000 | | 7.640.000.000 | | 7.920.000.000 | | 44.425.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah kawasan dan lingkungan permukiman strategis yang tertatadengan baik | Lokasi | 0 | 0 | 6.425.000.000 | 1 | 8.000.000.000 | 1 | 7.080.000.000 | 1 | 7.360.000.000 | 1 | 7.640.000.000 | 1 | 7.920.000.000 | 5 | 44.425.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.09.2.01.01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | | | | | 4.800.000.000 | | 2.900.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 19.700.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tersedia | Dokumen | 5 | 5 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 10 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.09.2.01.02 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | | | | | 1.625.000.000 | | 200.000.000 | | 330.000.000 | | 360.000.000 | | 390.000.000 | | 420.000.000 | | 3.325.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah dokumen supervsi penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia | Dokumen | 3 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.09.2.01.03 | Penataan Bangunan danLingkungan | | | | | 0 | | 4.000.000.000 | | 2.200.000.000 | | 2.300.000.000 | | 2.400.000.000 | | 2.500.000.000 | | 13.400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah lingkungan permukiman/ kawasan yang tertata | Lokasi | NA | 0 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 15 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.09.2.01.04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | | | | | 0 | | 900.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 5.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah lingkungan permukiman/ kawasan yang terpelihara | Lokasi | 4 | 0 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 8 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.09.2.01.06 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | | | | | 0 | | 0 | | 550.000.000 | | 600.000.000 | | 650.000.000 | | 700.000.000 | | 2.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan | Kota Medan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | |
| | | | | | Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan yang tersedia | Dokumen | 2 | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Terwujudnya bangunan gedung yang fungsional dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya | | | | Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni | % | 65 | 65 | | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 90 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan(Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | | 1.03.08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | 82.473.150.760 | | 200.492.723.920 | | 232.050.000.000 | | 334.700.000.000 | | 325.400.000.000 | | 315.900.000.000 | | 1.491.015.874.680 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal,berkualitas dan layak huni | % | 65 | 65 | 82.473.150.760 | 70 | 200.492.723.920 | 75 | 232.050.000.000 | 80 | 334.700.000.000 | 85 | 325.400.000.000 | 90 | 315.900.000.000 | 90 | 1.491.015.874.680 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedungdi Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | | | | | 82.473.150.760 | | 200.492.723.920 | | 232.050.000.000 | | 334.700.000.000 | | 325.400.000.000 | | 315.900.000.000 | | 1.491.015.874.680 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal,berkualitas dan layak huni | % | 65 | 65 | 82.473.150.760 | 70 | 200.492.723.920 | 75 | 232.050.000.000 | 80 | 334.700.000.000 | 85 | 325.400.000.000 | 90 | 315.900.000.000 | 100 | 1.491.015.874.680 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.01 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peranTenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | | | | 2.250.000.000 | | 2.250.000.000 | | 3.500.000.000 | | 3.800.000.000 | | 4.100.000.000 | | 4.400.000.000 | | 20.300.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah tim ahli bangunan gedung yangterbentuk | Tim | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah rekomendasi teknis IMB yangditerbitkan | buah | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah sertii¬□kat laik fungsi (SLF) yangditerbitkan | buah | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 12 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan PemanfaatanBangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 58.363.450.000 | | 147.819.140.000 | | 152.000.000.000 | | 274.000.000.000 | | 274.000.000.000 | | 274.000.000.000 | | 1.180.182.590.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan/rehabilitasi/renovasigedung daerah | Dokumen | 2 | 2 | | 7 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 22 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan/rehabilitasi/renovasigedung daerah | Dokumen | 3 | 3 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | 33 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Jumlah gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi/ direnovasi | Gedung | 16 | 16 | | 20 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | 35 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | | | Jumlah fasilitas peribadatan yang difasilitasi dana hibah untuk pembangunan/ rehabiliasi/ renovasi | unit | 0 | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.03 | | | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 0 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 400.000.000 | | 1.300.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah regulasi terkait bangunangedung daerah | Peraturan | 0 | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 8 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.04 | | | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 400.000.000 | | 1.350.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan(Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | | | | Jumlah gedung negara/ daerah yang diberikan bantuan teknis pembangunan | Gedung | 5 | 0 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 35 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.05 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 0 | | 550.000.000 | | 600.000.000 | | 650.000.000 | | 700.000.000 | | 2.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah laporan monitoring dan evaluasipenyelenggaraan bangunan gedung negara daerah | laporan | 5 | 0 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 9 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.06 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 500.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.200.000.000 | | 5.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah bangunan milik pemerintah kotaterdata yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya | Bangunan | 0 | 0 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | | 100 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah bangunan cagar budaya milik pemerintah kota yang direhabilitasi/renovasi/retroï¬□t/pelihara | Bangunan | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.07 | Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 300.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 2.700.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah bangunan gedung cagar budaya milik masyarakat yang diberikan bantuan teknis konstruksi | Bangunan | 2 | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah bangunan gedung cagar budaya milik masyarakat yang diberikan bantuan teknis perancangan konstruksi | Bangunan | 2 | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.11 | Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi | | | | | 0 | | 600.000.000 | | 800.000.000 | | 1.000.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 4.800.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah rumah tinggal tunggal danrumah deret yang dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi | unit | 3 | 0 | | 3 | | 5 | | 7 | | 9 | | 11 | | 9 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.12 | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untukKepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 20.259.700.760 | | 46.523.583.920 | | 70.000.000.000 | | 50.000.000.000 | | 40.000.000.000 | | 30.000.000.000 | | 256.783.284.680 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman | Kota Medan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dan Penataan Ruang | |
| | | | | | Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi/dipelihara/diubahsuaikan untuk kepentingan strategis daerah | unit | 88 | 88 | | 30 | | 40 | | 35 | | 30 | | 25 | | 25 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.08.2.01.13 | | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 1.600.000.000 | | 2.500.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 3.000.000.000 | | 16.100.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | Jumlah bangunan gedung daerah yang direhabilitasi/dipelihara/dirawat | unit | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan(Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| | Tersedianya rencana tata ruang yang terpadu, responsif, adaptif, partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan ruang kota yangnyaman, produktif, berdaya saing serta berkelanjutan | | | Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif | % | 65 | 65 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | | | | | 300.000.000 | | 11.300.000.000 | | 4.700.000.000 | | 3.100.000.000 | | 1.900.000.000 | | 1.100.000.000 | | 22.400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif | % | 65 | 65 | 300.000.000 | 70 | 11.300.000.000 | 70 | 4.700.000.000 | 70 | 3.100.000.000 | 70 | 1.900.000.000 | 70 | 1.100.000.000 | 70 | 22.400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 11.000.000.000 | | 500.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase rencana tata ruang yangditetapkan | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 11.000.000.000 | 0 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.01.02 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, KonsultasiEvaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 10.500.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 10.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah dokumen kelengkapan pengajuan permohonan persetujuansubstansi yang dipersiapkan | Dokumen | 0 | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.01.03 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan PenataanRuang | | | | | 0 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah peraturan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang yang tersedia | Peraturan | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang DaerahKabupaten/Kota | | | | | 0 | | 0 | | 2.600.000.000 | | 2.000.000.000 | | 800.000.000 | | 0 | | 5.400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | |
| | | | | | Persentase ketersediaan dokumenrencana tata ruang | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.600.000.000 | 0 | 2.000.000.000 | 0 | 800.000.000 | 0 | 0 | 100 | 5.400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.02.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 0 | | 1.600.000.000 | | 2.000.000.000 | | 800.000.000 | | 0 | | 4.400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | Jumlah dokumen dalam rangkapenyusunan revisi RDTR | Dokumen | 1 | 0 | | 0 | | 3 | | 4 | | 1 | | 0 | | 8 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| | | 1.03.12.2.02.03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | | | | | 0 | | 0 | | 1.000.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka revisi RDTR | Kali | 0 | 0 | | 0 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 0 | | 500.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah rencana investasi dan pembangunan daerah yang dikoordinasikan | Rencana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.03.02 | Sistem Informasi Penataan Ruang | | | | | 0 | | 0 | | 500.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah sistem informasi penataan ruang yang dikelola dengan baik | Aplikasi | 1 | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 1.100.000.000 | | 5.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Rasio pengendalian pemanfaatan ruang | % | 100 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 1.100.000.000 | 100 | 5.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | | | | | 0 | | 0 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 2.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah pelanggaran tata ruang yang ditertibkan dan dilakukan penegakkan hukum secara terkoordinasi | Bangunan | NA | 0 | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.12.2.04.03 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | | | | | 0 | | 0 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 1.200.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah PPNS Bidang Penataan Ruang yang melaksanakan fungsinya dengan baik | orang | 10 | 0 | | 0 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | |
| | | 1.03.12.2.04.04 | | Koordinasi Pelaksanaan PenataanRuang | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 1.800.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | Jumlah pelaksanaan koordinasipenataan ruang | Kali | 12 | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Tersedianya lahan bagi pembangunankota | | | | Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota | % | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 2.10.05 | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAHUNTUK PEMBANGUNAN | | | | | 53.223.036.482 | | 331.289.582.095 | | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | 1.184.512.618.577 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | | | | Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota | % | 100 | 70 | 53.223.036.482 | 70 | 331.289.582.095 | 70 | 200.000.000.000 | 70 | 200.000.000.000 | 70 | 200.000.000.000 | 70 | 200.000.000.000 | 70 | 1.184.512.618.577 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 2.10.05.2.01 | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 53.223.036.482 | | 331.289.582.095 | | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | 1.184.512.618.577 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Total luas tanah yang tersedia bagi pembangunan kota | Ha | NA | NA | 53.223.036.482 | NA | 331.289.582.095 | NA | 200.000.000.000 | NA | 200.000.000.000 | NA | 200.000.000.000 | NA | 200.000.000.000 | NA | 1.184.512.618.577 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 2.10.05.2.01.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 53.223.036.482 | | 331.289.582.095 | | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | 200.000.000.000 | | 1.184.512.618.577 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan kota | Lokasi | 5 | 6 | | 7 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 33 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| Meningkatkan kawasan permukiman dan perumahan yang layak huni | | | | Luas kawasan permukiman layak huni | Ha | 25690,2 | 25690,2 | | 25854,16 | | 26018,12 | | 26182,02 | | 26346,04 | | 26510 | | 26510 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi aman | | | Persentase rumah tinggal bersanitasi aman | % | 4,85 | 5,3 | | 5,8 | | 6,71 | | 8,11 | | 10,03 | | 10,03 | | 10,03 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | 4.000.000.000 | | 10.704.000.000 | | 32.800.000.000 | | 32.800.000.000 | | 32.800.000.000 | | 32.800.000.000 | | 145.904.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. | % | 4,85 | 5,3 | 4.000.000.000 | 5,8 | 10.704.000.000 | 6,71 | 32.800.000.000 | 8,11 | 32.800.000.000 | 10,03 | 32.800.000.000 | 10,03 | 32.800.000.000 | 10,03 | 145.904.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 4.000.000.000 | | 10.704.000.000 | | 32.800.000.000 | | 32.800.000.000 | | 32.800.000.000 | | 32.800.000.000 | | 145.904.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | Rumah | 200 | 200 | 4.000.000.000 | 1000 | 10.704.000.000 | 2000 | 32.800.000.000 | 2000 | 32.800.000.000 | 2000 | 32.800.000.000 | 2000 | 32.800.000.000 | 5200 | 145.904.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.03.05.2.01.01 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestikdalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 1.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah dokumen perencanaan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah yang tersedia | Dokumen | 2 | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.05.2.01.02 | | | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah DomestikTerpusat Skala Kota | | | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah dokumen supervisi pembangunan jaringan pipa air limbahsambungan rumah tangga dan septic tank individu | Dokumen | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | | 1.03.05.2.01.04 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | | | | | 2.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | 28.000.000.000 | | 28.000.000.000 | | 28.000.000.000 | | 28.000.000.000 | | 120.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah rumah tangga yang tersambungjaringan pipa air limbah perkotaan | SR | 286 | 286 | | 400 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 8600 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.05.2.01.06 | Pembangunan/Penyediaan SubSistem Pengolahan Setempat | | | | | 2.000.000.000 | | 4.304.000.000 | | 4.400.000.000 | | 4.400.000.000 | | 4.400.000.000 | | 4.400.000.000 | | 23.904.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah septic tank individual kedapyang tersedia | unit | 170 | 170 | | 192 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | 200 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.05.2.01.08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait PenyediaanSistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | | | | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah lokasi sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan airlimbah domestik | Lokasi | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap air minum layak | | | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak | % | 87 | 90,25 | | 93,5 | | 96,75 | | 98 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAANAIR MINUM | | | | | 7.500.000.000 | | 9.185.000.000 | | 19.800.000.000 | | 34.800.000.000 | | 34.800.000.000 | | 49.800.000.000 | | 155.885.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase jumlah rumah yang mendapatkan akses terhadap air minummelalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota | % | 87 | 90,25 | 7.500.000.000 | 93,5 | 9.185.000.000 | 96,75 | 19.800.000.000 | 98 | 34.800.000.000 | 100 | 34.800.000.000 | 100 | 49.800.000.000 | 100 | 155.885.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | | | | | 7.500.000.000 | | 9.185.000.000 | | 19.800.000.000 | | 34.800.000.000 | | 34.800.000.000 | | 49.800.000.000 | | 155.885.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase fasilitasi peningkatan aksesair minum layak | % | 87 | 90,25 | 7.500.000.000 | 93,5 | 9.185.000.000 | 96,75 | 19.800.000.000 | 98 | 34.800.000.000 | 100 | 34.800.000.000 | 100 | 49.800.000.000 | 100 | 155.885.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.03.03.2.01.01 | | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | | | | | 0 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 1.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah dokumen rencana teknis SPAMyang tersedia | Dokumen | 2 | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.03.2.01.02 | | | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | | | | | 0 | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah dokumen supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM | Dokumen | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.03.2.01.03 | | | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | | | | | 1.500.000.000 | | 3.000.000.000 | | 4.500.000.000 | | 4.500.000.000 | | 4.500.000.000 | | 4.500.000.000 | | 22.500.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan(Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| | | | | Jumlah sumur bor yang terbangun | Lokasi | 1 | 1 | | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.03.03.2.01.07 | Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan | | | | | 6.000.000.000 | | 5.985.000.000 | | 15.000.000.000 | | 30.000.000.000 | | 30.000.000.000 | | 45.000.000.000 | | 131.985.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah rumah yang memperoleh aksesjaringan perpipaan air bersih PDAM | Rumah | 600 | 600 | | 590 | | 1500 | | 3000 | | 3000 | | 4500 | | 4500 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Terwujudnya infrastruktur kawasan permukiman danperumahan yanglayak huni | | | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | % | 96,9 | 96,9 | | 97,9 | | 98,4 | | 98,9 | | 99,4 | | 100 | | 100 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | 16.859.002.820 | | 20.220.000.000 | | 23.548.000.000 | | 24.781.000.000 | | 26.014.000.000 | | 27.247.000.000 | | 138.669.002.820 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase kawasan permukiman layakhuni | % | 96,9 | 96,9 | 16.859.002.820 | 97,9 | 20.220.000.000 | 98,4 | 23.548.000.000 | 98,9 | 24.781.000.000 | 99,4 | 26.014.000.000 | 100 | 27.247.000.000 | 100 | 138.669.002.820 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan danPengembangan Kawasan Permukiman | | | | | 0 | | 400.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah perumahan yang diserah terimakan PSU | Perumahaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.01.02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan PengembanganKawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | | | | | 0 | | 400.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | Dokumen | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah peraturan mengenai Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersedia | Peraturan | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.04.03.2.02 | | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)Ha | | | | | 459.002.820 | | 950.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 2.409.002.820 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | | Persentase kawasan kumuh dibawah 10Ha yang ditangani | % | 97,4 | 97,4 | 459.002.820 | 97,9 | 950.000.000 | 98,4 | 250.000.000 | 98,9 | 250.000.000 | 99,4 | 250.000.000 | 100 | 250.000.000 | 100 | 2.409.002.820 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.02.01 | | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan PermukimanKumuh | | | | | 0 | | 200.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | Ketersediaan penetapan lokasi kumuhberdasarkan hasil survey dan pendataan yang memadai | Dokumen | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.02.02 | | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | | | | | 0 | | 200.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan(Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| | | | | Jumlah Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Dokumen | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.02.03 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat diPermukiman Kumuh | | | | | 0 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 250.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) yang dibina | Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) | 25 | 0 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.02.04 | Penyadaran Publik PencegahanTumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | | | | | 459.002.820 | | 500.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 1.759.002.820 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah lokasi penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh | Lokasi | 6 | 6 | | 7 | | 7 | | 6 | | 6 | | 6 | | 6 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.03 | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas diBawah 10 (sepuluh) Ha | | | | | 16.400.000.000 | | 18.870.000.000 | | 23.298.000.000 | | 24.531.000.000 | | 25.764.000.000 | | 26.997.000.000 | | 135.860.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase kawasan kumuh dibawah 10Ha yang ditangani | % | 97,4 | 97,4 | 16.400.000.000 | 97,9 | 18.870.000.000 | 98,4 | 23.298.000.000 | 98,9 | 24.531.000.000 | 99,4 | 25.764.000.000 | 100 | 26.997.000.000 | 100 | 135.860.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.03.02 | Perbaikan Rumah Tidak LayakHuni | | | | | 16.400.000.000 | | 18.000.000.000 | | 19.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | 21.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | 116.400.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah rumah tidak layak huni padakawasan permukiman kumuh yang diperbaiki | Rumah | 328 | 328 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.03.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | 0 | | 0 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 500.000.000 | | 2.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah lokasi penataan permukimankumuh secara terkoordinasi | Lokasi | 2 | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.03.05 | Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman | | | | | 0 | | 670.000.000 | | 798.000.000 | | 931.000.000 | | 1.064.000.000 | | 1.197.000.000 | | 4.660.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan | Kota Medan |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | |
| | | | | | | Jumlah rumah tangga yang disalurkanbantuan uang sewa rumah tinggal sementara | Rumah tangga | 134 | 0 | | 134 | | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.03.06 | | | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | | | | | 0 | | 0 | | 3.000.000.000 | | 3.100.000.000 | | 3.200.000.000 | | 3.300.000.000 | | 12.600.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah lokasi permukiman kumuh yangdipugar/ diremajakan | Lokasi | 2 | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.03.2.03.07 | | | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh | | | | | 0 | | 200.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan(Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | | | | Tersedianya data dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh | Dokumen | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| Meningkatkan keterjangkauanhunian bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah | | | | Persentase pemanfaatan hunian yang tersedia bagi rumah tangga berpenghasilan rendah | % | 70 | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah | | | Jumlah unit hunian rumah tangga berpenghasilan rendah yang terfasilitasi | unit | 70 | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 95 | | 95 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | | | | | 3.625.000.000 | | 6.168.502.544 | | 5.650.000.000 | | 6.650.000.000 | | 7.650.000.000 | | 8.650.000.000 | | 38.393.502.544 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase cakupan penyelenggaraan pengembangan perumahan yang berkeadilan, tertib dan terkendali | % | 65 | 65 | 3.625.000.000 | 75 | 6.168.502.544 | 80 | 5.650.000.000 | 85 | 6.650.000.000 | 90 | 7.650.000.000 | 100 | 8.650.000.000 | 100 | 38.393.502.544 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 650.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 850.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah dokumen pendataan untuk keperluan penyediaan dan rehabilitasirumah korban bencana atau relokasi program kota | Dokumen | 5 | 0 | 0 | 5 | 650.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 25 | 850.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.02.2.01.01 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 200.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah dokumen identifikasi perumahanrawan bencana atau terkena relokasi program kota yang tersedia | Dokumen | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.02.2.01.02 | Identifikasi Lahan-lahan Potensialsebagai Lokasi Relokasi Perumahan | | | | | 0 | | 200.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah dokumen identifikasi lahan- lahan potensial sebagai lokasi relokasiperumahan yang tersedia | Dokumen | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.04.02.2.01.05 | | | Pendataan dan Verifikasi PenerimaRumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 250.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah data dan hasil verifikasi penerima rumah bagi korban bencanaalam atau terkena relokasi program kota | Data | 1 | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.02.2.01.06 | | | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun danRumah Khusus | | | | | 0 | | 200.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 200.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah dokumen pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susundan rumah khusus | Dokumen | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| | | 1.04.02.2.05 | Pembinaan Pengelolaan RumahSusun Umum dan/atau Rumah Khusus | | | | | 3.300.000.000 | | 5.518.502.544 | | 5.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | 8.000.000.000 | | 34.818.502.544 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Capaian fasilitasi pembinaan pengelolaan rumah susun umum | % | 100 | 100 | 3.300.000.000 | 100 | 5.518.502.544 | 100 | 5.000.000.000 | 100 | 6.000.000.000 | 100 | 7.000.000.000 | 100 | 8.000.000.000 | 100 | 34.818.502.544 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.02.2.05.01 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | | | | | 3.300.000.000 | | 5.518.502.544 | | 5.000.000.000 | | 6.000.000.000 | | 7.000.000.000 | | 8.000.000.000 | | 34.818.502.544 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah rumah susun umum yangterfasilitasi pemeliharaan PSU | Lokasi | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan danPengembangan Perumahan | | | | | 325.000.000 | | 0 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 2.725.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah perumahan yang diserah terimakan PSU | Perumahan | 20 | 20 | 325.000.000 | 20 | 0 | 20 | 600.000.000 | 20 | 600.000.000 | 20 | 600.000.000 | 20 | 600.000.000 | 20 | 2.725.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.02.2.06.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | 325.000.000 | | 0 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 2.725.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | jumlah serah terima PSU perumahan | Kali | 12 | 12 | | 0 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| Mengoptimalkan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | | | | Persentase peningkatan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | % | 70 | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 100 | | 100 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Tersedianya dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | | | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | % | 70 | 70 | | 75 | | 80 | | 85 | | 90 | | 100 | | 100 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 42.766.794.426 | | 38.567.320.549 | | 39.231.019.700 | | 39.773.819.000 | | 40.361.819.000 | | 40.849.819.000 | | 241.550.591.675 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia | % | 70 | 70 | 42.766.794.426 | 75 | 38.567.320.549 | 80 | 39.231.019.700 | 85 | 39.773.819.000 | 90 | 40.361.819.000 | 100 | 40.849.819.000 | 100 | 241.550.591.675 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 270.000.000 | | 270.000.000 | | 283.000.000 | | 294.000.000 | | 305.000.000 | | 316.000.000 | | 1.738.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia | Dokumen | 4 | 4 | 270.000.000 | 4 | 270.000.000 | 4 | 283.000.000 | 4 | 294.000.000 | 4 | 305.000.000 | 4 | 316.000.000 | 4 | 1.738.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan(Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| | | 1.04.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | 257.500.000 | | 257.500.000 | | 270.000.000 | | 280.000.000 | | 290.000.000 | | 300.000.000 | | 1.655.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia | Dokumen | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 13.000.000 | | 14.000.000 | | 15.000.000 | | 16.000.000 | | 83.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD yangtersedia | Dokumen | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.02 | Administrasi Keuangan PerangkatDaerah | | | | | 17.525.669.000 | | 17.525.669.000 | | 17.531.169.000 | | 17.537.169.000 | | 17.543.169.000 | | 17.549.169.000 | | 105.212.014.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yangtersedia | % | 100 | 100 | 17.525.669.000 | 100 | 17.525.669.000 | 100 | 17.531.169.000 | 100 | 17.537.169.000 | 100 | 17.543.169.000 | 100 | 17.549.169.000 | 100 | 105.212.014.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan TunjanganASN | | | | | 17.283.169.000 | | 17.283.169.000 | | 17.283.169.000 | | 17.283.169.000 | | 17.283.169.000 | | 17.283.169.000 | | 103.699.014.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Frekuensi pemberian pemberian gajidan tunjangan kepada pegawai ASN | Kali | 1296 | 1296 | | 1296 | | 1296 | | 1296 | | 1296 | | 1296 | | 1296 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 235.000.000 | | 240.000.000 | | 245.000.000 | | 250.000.000 | | 1.430.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah Pekerjaan Tambahan di Luar JamKantor | % | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 13.000.000 | | 14.000.000 | | 15.000.000 | | 16.000.000 | | 83.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun yang tersedia | Dokumen | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | | |
| | | 1.04.01.2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 1.830.150.000 | | 1.637.150.000 | | 1.850.150.000 | | 1.900.150.000 | | 1.950.150.000 | | 2.000.150.000 | | 11.167.900.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | | Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yangtersedia | % | 100 | 100 | 1.830.150.000 | 100 | 1.637.150.000 | 100 | 1.850.150.000 | 100 | 1.900.150.000 | 100 | 1.950.150.000 | 100 | 2.000.150.000 | 100 | 11.167.900.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.05.02 | | | Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya | | | | 680.000.000 | | 515.000.000 | | 700.000.000 | | 750.000.000 | | 800.000.000 | | 850.000.000 | | 4.295.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia | Stell | 400 | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | 400 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| | | 1.04.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | 1.050.000.000 | | 1.022.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | 1.050.000.000 | | 6.272.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah ASN yang diberikan pendidikandan pelatihan | orang | 39 | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | | 39 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | 100.150.000 | | 100.150.000 | | 100.150.000 | | 100.150.000 | | 100.150.000 | | 100.150.000 | | 600.900.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah peraturan perundang-undanganyang disosialisasikan di perangkat daerah | Peraturan | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.06 | Administrasi Umum PerangkatDaerah | | | | | 3.796.550.193 | | 3.749.203.216 | | 3.979.000.000 | | 4.145.000.000 | | 4.311.000.000 | | 4.477.000.000 | | 24.457.753.409 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Jumlah Kegiatan yang mendukungAdministrasi Umum | Tahun | 1 | 1 | 3.796.550.193 | 1 | 3.749.203.216 | 1 | 3.979.000.000 | 1 | 4.145.000.000 | 1 | 4.311.000.000 | 1 | 4.477.000.000 | 1 | 24.457.753.409 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | 62.966.650 | | 61.671.250 | | 65.000.000 | | 70.000.000 | | 75.000.000 | | 80.000.000 | | 414.637.900 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor | Jenis | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor | | | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 850.000.000 | | 900.000.000 | | 950.000.000 | | 1.000.000.000 | | 5.300.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor | unit | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | 1.382.083.543 | | 1.336.031.966 | | 1.450.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.550.000.000 | | 1.600.000.000 | | 8.818.115.509 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah Tersedianya alat tulis kantor | Tahun | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | |
| | | 1.04.01.2.06.05 | | | Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan | | | | | 600.000.000 | | 600.000.000 | | 650.000.000 | | 700.000.000 | | 750.000.000 | | 800.000.000 | | 4.100.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun | Tahun | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.06.08 | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | 13.500.000 | | 13.500.000 | | 14.000.000 | | 15.000.000 | | 16.000.000 | | 17.000.000 | | 89.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah tamu kantor yang disediakanmakanan dan minuman | orang | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| | | 1.04.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD | | | | | 938.000.000 | | 938.000.000 | | 950.000.000 | | 960.000.000 | | 970.000.000 | | 980.000.000 | | 5.736.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah perjalanan dinas dalam rangkarapat koordinasi dan konsultasi yang tersedia | Kali | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | 2.403.397.633 | | 2.418.917.633 | | 2.450.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.550.000.000 | | 2.600.000.000 | | 14.922.315.266 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahdaerah yang tersedia | % | 100 | 100 | 2.403.397.633 | 100 | 2.418.917.633 | 100 | 2.450.000.000 | 100 | 2.500.000.000 | 100 | 2.550.000.000 | 100 | 2.600.000.000 | 100 | 14.922.315.266 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya | | | | | 2.403.397.633 | | 2.418.917.633 | | 2.450.000.000 | | 2.500.000.000 | | 2.550.000.000 | | 2.600.000.000 | | 14.922.315.266 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnyayang tersedia | unit | 335 | 335 | | 350 | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah | | | | | 11.464.122.600 | | 11.689.475.700 | | 11.757.700.700 | | 11.912.500.000 | | 12.112.500.000 | | 12.212.500.000 | | 71.148.799.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase cakupan jasa penunjangurusan pemerintah daerah yang tersedia | % | 100 | 100 | 11.464.122.600 | 100 | 11.689.475.700 | 100 | 11.757.700.700 | 100 | 11.912.500.000 | 100 | 12.112.500.000 | 100 | 12.212.500.000 | 100 | 71.148.799.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 12.475.000 | | 12.475.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 12.500.000 | | 74.950.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah surat menyurat yang terkirimmelalui jasa pengiriman | Surat | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 3.581.800.000 | | 3.581.800.000 | | 3.600.000.000 | | 3.650.000.000 | | 3.700.000.000 | | 3.750.000.000 | | 21.863.600.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yangterbayar | Rekening | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ruang | |
| | | 1.04.01.2.08.03 | | | Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor | | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 300.000.000 | | 350.000.000 | | 400.000.000 | | 450.000.000 | | 2.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia melalui sewa atau bentukjasa lainnya | unit | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.08.04 | | | Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor | | | | | 7.619.847.600 | | 7.845.200.700 | | 7.845.200.700 | | 7.900.000.000 | | 8.000.000.000 | | 8.000.000.000 | | 47.210.249.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | | | Jumlah tenaga jasa pelayanan umumyang tersedia | orang | 169 | 169 | | 169 | | 169 | | 169 | | 169 | | 169 | | 169 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan(Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| | | 1.04.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | 5.476.905.000 | | 1.276.905.000 | | 1.380.000.000 | | 1.485.000.000 | | 1.590.000.000 | | 1.695.000.000 | | 12.903.810.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah | % | 100 | 100 | 5.476.905.000 | 100 | 1.276.905.000 | 100 | 1.380.000.000 | 100 | 1.485.000.000 | 100 | 1.590.000.000 | 100 | 1.695.000.000 | 100 | 12.903.810.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan | | | | | 1.100.545.000 | | 1.100.545.000 | | 1.200.000.000 | | 1.300.000.000 | | 1.400.000.000 | | 1.500.000.000 | | 7.601.090.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara | Tahun | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya | | | | | 176.360.000 | | 176.360.000 | | 180.000.000 | | 185.000.000 | | 190.000.000 | | 195.000.000 | | 1.102.720.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah Peralatan dan mesin lainnyayang terpelihara | Tahun | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya | | | | | 4.200.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.200.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |
| | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunanlainnya yang dipelihara | unit | NA | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | NA | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| Meningkatkan rumah layak hunipada kawasan permukiman kumuh | | | | Persentase Rasio rumah layak huni | % | 85 | 85 | | 88,75 | | 92,5 | | 96,25 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | Meningkatnya rumah layak hunipada kawasan permukiman kumuh | | | Persentase Rasio rumah layak huni | % | 85 | 85 | | 88,75 | | 92,5 | | 96,25 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.04 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH | | | | | 0 | | 18.000.000.000 | | 19.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | 21.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | 100.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Persentase pencegahan kawasanpermukiman kumuh | % | 97,4 | 97,4 | 0 | 97,9 | 18.000.000.000 | 98,4 | 19.000.000.000 | 98,9 | 20.000.000.000 | 99,4 | 21.000.000.000 | 100 | 22.000.000.000 | 100 | 100.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh padaDaerah Kabupaten/Kota | | | | | 0 | | 18.000.000.000 | | 19.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | 21.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | 100.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | | | Persentase pencegahan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | % | 97,4 | 97,4 | 0 | 97,9 | 18.000.000.000 | 98,4 | 19.000.000.000 | 98,9 | 20.000.000.000 | 99,4 | 21.000.000.000 | 100 | 22.000.000.000 | 100 | 100.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |
| | | 1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | | | | | 0 | | 18.000.000.000 | | 19.000.000.000 | | 20.000.000.000 | | 21.000.000.000 | | 22.000.000.000 | | 100.000.000.000 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | Kota Medan |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan(Tahun 2020) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* |
| | | | | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki untuk Pencegahan terhadapTumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | unit | 0 | 0 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang | |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilaksanakan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2021-2026. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD, identifikasi tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 melalui program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan dapat diukur melalui indikator dan target kinerja. Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

| | **INDIKATOR** | **Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | | | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(4)** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | |
| 1 | Persentase bangunan gedung yang terselenggara secara tertib, andal, berkualitas dan layak huni | 65 % | 65 % | 70 % | 75% | 80% | 85% | 90% |
| | Cakupan lingkungan yang didukung dengan infrastruktur permukiman yang memadai | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% |
| 2 | Persentase penyelenggaraan penataan ruang yang efektif | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| | Persentase penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Persentase rumah tinggal bersanitasi aman | 4,85% | 5,31% | 5,8% | 6,71% | 8,11% | 10,08% | 12,22% |
| | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak | 87% | 90,25 % | 93,5% | 96,75 % | 98% | 100% | 100% |
| | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani | 96,9% | 96,9% | 97,9% | 98,4% | 98,9% | 99,4% | 100% |
| | Persentase Rasio rumah layak huni | 85% | 85% | 88,75% | 92,5% | 96,25% | 100% | 100% |

# PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan tahun 2021 – 2026 ini dibuat untuk menentukan arah pembangunan perumahan, kawasan permukiman, dan penataan ruang di Kota Medan selama 5 tahun ke depan sekaligus menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dalam mendukung program-program pembangunan Kota Medan.

Renstra ini dapat digunakan sebagai sumber untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan serta sebagai tolok ukur sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu dengan Renstra ini diharapkan dapat diterapkan dengan konsisten, terbuka, penuh kejujuran dan tanggung jawab sesuai dengan azas-azas kebenaran dan moralitas.

Harapan kami semoga renstra ini dapat bermanfaat sebagai panduan perencanaan dan penyelenggara pembangunan dari seluruh elemen masyarakat.